

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern yang ada dalam perusahaan bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan, namun diadakan untuk mengatasi semua kemungkinan jika terjadi kesalahan atau penyelewengan dengan cepat dan tepat. Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian Intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai dengan efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian internal mempunyai banyak peranan dan fungsi bagi perusahaan dalam melangsungkan kegiatan operasinya. Pengendalian internal yang kurang baik memungkinkan banyak menimbulkan masalah dalam perusahaan dan sebaliknya, jika pengendalian intern yang baik dapat 2 memungkinkan manajemen dapat menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, pergeseran

permintaan pelanggan dan fraud serta restrukturisasi untuk masa yang akan datang. menjadi suatu kekuatan yang riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang baik akan meminimalkan terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh tenaga kerja. Jika perusahaan tidak mempunyai pengendalian intern yang baik maka akan lebih mudah untuk melakukan kecurangan oleh tenaga kerja dalam instansi tersebut. Keefektifan pengendalian internal diperlukan untuk merencanakan dan melaporkan hasil yang akan dievaluasi oleh komite sistem pengendalian internal. Fungsi sistem pengendalian internal digunakan sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi agar dapat membantu pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel. Pengendalian intern yang baik biasanya mencakup setidaknya-tidaknya ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu struktur organisasi yang didalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional yang sesuai
2. Suatu sistem yang mencakup prosedur otorisasi dan pencatatan yang sesuai agar memungkinkan pengendalian yang wajar atas harta, utang. Pendapatan dan biaya
3. Cara kerja yang wajar yang harus digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian organisatoris
4. Kepegawaian dan mutu yang sepadan dengan tanggungjawabnya.

Kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank karena sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan pemberian kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit, tetapi pemberian kredit ini juga pasti dapat menimbulkan sebuah resiko. Risiko yang muncul atas pemberian kredit adalah terjadinya kredit macet.

Kredit macet terjadi jika kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak lain (debitur) tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya baik pokok ataupun bunga pinjaman yang telah ditetapkan, sehingga dapat menekan dan mengurangi keuntungan bank. Risiko kemacetan kredit dapat dikurangi dengan menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif. Resiko kemacetan kredit dapat

dikurangi dengan menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif. PT BPR NBP 1 Siborongborong memiliki komitmen untuk memberikan penyaluran kredit untuk pembiayaan produktif segmen usaha kecil, menengah, dan koperasi yang layak. Dalam pelaksanaan pemberian kredit resiko kemacetan kredit merupakan masalah yang sangat berpengaruh pada kesehatan bank.

Kredit diadakan karena kredit salah satu kegiatan terpenting dalam industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya, serta sebagai salah satu sumber terpenting dari setiap kegiatan usaha pada setiap pembangunan negara- negara di dunia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Salah satu fungsi bank sebagai penyalur atau pemberi kredit, tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Apabila kredit bermasalah dibiarkan begitu saja, maka dapat menyebabkan kerugian materi bagi bank karena selain mengganggu aktivitas bank juga dapat merusak nama baik bank. Kita pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

Pengendalian intern pemberian kredit adalah suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit tersebut dapat ditarik kembali beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar

terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Intern serta Sistem Informasi Akuntansi dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian kredit. Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah penyedia informasi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Berdasarkan hal ini maka akan dibahas lebih mendalam mengenai :

Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPR NBP 1 Siborongborong.

Menurut Badnar & Hopwood (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunaannya.

Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran (Kasmir, 2014 : 35). PT BPR NBP 1 Siborongborong merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Siborongborong yang dulunya dikenal sebagai PT Bank Bumiasih. Didirikan oleh St.Karel Mompang Sinaga pada tanggal. 10 november 1991 Produk Kredit yang diberikan PT BPR NBP 1 Siborongborong diantaranya yaitu Kredit Bona Pinasa, Kredit KPN, Kredit Dana Mandiri, Kredit Maju Bersama. Berdasarkan SE No.5/22/DPNP yang dikutip oleh Amanina (2011:2), dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut.Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah pada PT BPR NBP 1 siborongborong salah satu perusahaan yang menawarkan kredit kepada setiap kalangan yang kita ketahui tujuan dilakukannya kredit tersebut adalah untuk keuntungan perusahaan. Jadi akan ada kemungkinan dalam setiap pemberian kredit terjadi kredit macet. Lalu perusahaan haruslah bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan mengangkat judul penelitian :**“ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN KREDIT PADA PT.BPR NBP 1 SIBORONGBORONG”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pengendalian intern dalam pemberian kredit pada PT BPR NBP 1 Siborongborong?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PT BPR NBP 1 Siborongborong untuk menanggulangi kendala-kendala dalam penerapan pengendalian intern terkait pemberian kredit?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian berfokus pada apa yang diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang dimana datanya diperoleh langsung dari PT.BPR NBP 1 Siborongborong.

1.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki fungsi yang berguna bagi penulis, adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Pengendalian intern kredit pada PT BPR NBP 1 Siborongborong.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT BPR NBP 1 Siboronborong dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut dalam pemberian kredit.

1.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis tentang Bank dan juga Penerapan pengendalian kredit pada PT BPR NBP 1 Siborongborong.

2. Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan dalam memberikan masukan yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memperbaiki pemberian kredit dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademi

Sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wasasan kepada akademis penerapan pengendalian intern kredit pada PT BPR NBP 1 Siborongborong dan juga sebagai masukan untuk menyempurnakan penelitian sejenis berikutnya

1.3. Sistematika Penulisan Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis data, dan pembahasan serta kesimpulan dan saran.

BAB I Pendahuan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang menunjang penulisan/penelitian yang bisa diperkuat dengan menunjukkan penelitian sebelumnya

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai objek Penelitian, metode analisis data. Jenis data penelitian, metode penelitian data, dan teknik penelitian data

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dan membahas data mengenai bagaimana pengendalian intern aktiva tetap pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini pembahas akan menarik kesimpulan yaitu berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk [kredit](#) dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan danadari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.1.2 Fungsi Bank

Lembaga keuangan bernama bank bukan sesuatu yang asing lagi pada masa kini. Keberadaan bank sangat memiliki fungsi yang besar di sekitar kehidupan manusia. Jika dahulu bank hanya dikenal bagi pihak-pihak yang ingin menabungkan sebagian uangnya, kini fungsi dan kegiatan operasional bank

semakin beragam. Secara sederhana, bank kini sudah mengaakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan. Mulai dari mentransfer dana secara *real time* antar rekening, pembayaran dan penerimaan gaji, pembayaran terhadap barang dan jasa, sampai melakukan investasi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga ini.

Sebagian orang menjadikan bank sebagai tempat menabung semata. Menyimpan uang di bank dianggap aman karena bisa mencegahnya dari pencurian ataupun pemakaian diri sendiri yang kelewat batas. Di sisi lain, banyakorang mengharapkan mendapat bunga dari kegiatan menabungnya di bank. Sebagian kecil lainnya mulai menyadari bahwa fungsi bank lebih dari sekadar menyimpan uang. Mereka mulai melirik bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Dari yang sebagian kecil ini, beberapa pihak menyadari bahwa bank dapat dijadikan sarana untuk melakukan investasi. Bentuk investasi di bank bisa dilakukan melalui produk deposito yang memberikan bunga lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Ada pula sebagian orang lainnya yang memanfaatkan jasa perbankan untuk melakukan kredit. Bank memang menyediakan berbagai produk kredit yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat, mulai dari kredit tanpa agunan (KTA), [Kredit Pemilikan Rumah \(KPR\)](#), sampai Kredit Pemilikan Kendaraan.

Berbagai produk pinjaman ini dihadirkan dengan bunga yang kompetitif sehingga masyarakat sering kali merasa terbantu sebab dengan pinjaman dari bank, mereka dapat memiliki barang yang mereka butuhkan dan inginkan. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank ini tidak terlepas dari tujuan lembaga perbankan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam peraturan itu disebutkan, tujuan perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan penting dari bank tersebut membuat lembaga keuangan ini harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jika ada yang berpikir bahwa bank hanyalah lembaga yang mencari profit semata, tentu anggapan itu salah. Sebab

dari penjabaran Undang-Undang tentang Perbankan tersebut, terdapat tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh tiap bank guna mendukung pembangunan nasional. Adapun fungsi Bank menurut Undang-undang perbankan yaitu:

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan [membuka berbagai produk tabungan](#). Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Tidak hanya tabungan biasa, bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Produk yang satu ini menawarkan bunga lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan produk tabungan biasa.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional.

3. Menyediakan layanan Jasa Bank

Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bank akhirnya difungsikan pula untuk menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga ke

luar negeri. Namun seiring waktu, layanan bank kini semakin beraneka ragam. Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Dengan layanan jasa tersebut, masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian. Contohnya saja, kini bank menyediakan layanan pembayaran listrik, telepon, sampai pembelian tiket transportasi. Dengan layanan tersebut, alur pembayaran maupun menjadi lebih jelas dan aman.

Ketiga fungsi bank dijalankan dalam berbagai kegiatan operasional yang menunjang. Untuk melakukan kegiatan secara fungsinya, ada dua jenis bank yang perlu diketahui, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Berikut adalah beragam kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank menurut kedua jenis lembaga keuangan tersebut.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka 15 terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain :

a. Dari segi fungsinya:

1. Bank Sentral

Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter seperti stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di sebuah negara. Di Indonesia, bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Tujuan ini didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiganya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

2. Bank Umum

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum. Bank umum menawarkan berbagai produk dan jasa kepada masyarakat sesuai fungsinya dengan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum yang berarti bank tersebut dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada kepada masyarakat dan wilayah operasionalnya tersebar di seluruh wilayah.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Pada umumnya lokasi BPR dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

b. Dari segi kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

1. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

2. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

b. Dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaandan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batasbatas negara.

c. Dari segi cara menentukan harga

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak lain untuk

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2 Konsep Pemberian kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *creder* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Menurut Mac Leod yang dikutip oleh Firdaus dan Ariyanti (2009:1), kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir (2010:105), tujuan pemberian kredit tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan pemberian kredit tersebut sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembanguna di berbagai sektor, terutama sektor riil. Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan gairah usaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Kasmir (2010:98), adapun unsur-unsur kredit ialah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun).

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

5. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

A. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Budi Untung (2005:4), jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah.

Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi:

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
- b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal

tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih.

- c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif)

Dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit dikelompokkan menjadi:

1. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
2. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil.

1. Kredit Besar.

Dari segi waktunya, kredit dikelompokkan:

- a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel
- b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Dari segi jaminannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (unsecured loan). Kredit ini menurut Undang-undang perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan karena UU Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pokok perjanjian.

- b. Kredit dengan jaminan (secured loan), di mana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya.

B. Prinsip Pemberian kredit

Sebelum fasilitas suatu kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria – kriteria serta aspek – aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P, Kasmir (2010:108). Penjelasan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek usaha yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P, Kasmir (2010:110) adalah sebagai berikut:

1. Personality

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tungkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

C. Faktor – Faktor Kredit Bermasalah

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain adalah penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank, Ismail (2010:218) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern Bank

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank antara lain:

1. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris. Direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.

b. Faktor Ekstern Bank

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (Side streaming). Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk modal kerja.

- d. Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

D. Upaya-upaya penyelesaian Kredit Bermasalah

Upaya yang ditempuh untuk menyelamatkan kredit bermasalah, yaitu:

- a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

- b. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

- c. Restructuring (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: Penambahan dana bank, atau Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

- d. Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

i. Pengertian pengendalian intern

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut :

keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengertian system pengendalian intern menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, system pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan.

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah suatu system yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern.

Dalam laporan Commite of sponsoring Organization Konsep Pengendalian Intern(COSO) yang dikutip oleh Boynton et al. (2013:373) mendefenisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektivitas dan efisiensi operasi

2.4 Penerapan pengendalian intern dalam pemberian kredit

Pengendalian intern pemberian kredit adalah suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Artinya, kredit tersebut dapat ditarik kembali peserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sistem pengendalian internal dan prinsip pengendalian internal digunakan untuk membatasi perilaku kita pada titik ekstrim tertentu. Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu Bank, dengan adanya pengendalian intern maka kegiatan operasional bank akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, dan penyelewengan.

Pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai dengan baik. Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan manusia. Mulyadi (2013:164) adalah meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ardiyos dalam Tuty (2012:11) adalah :Pengendalian internal adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa, sehingga antara bagian yang satu segera otomatis akan

mengawasi bagian yang lainnya. Pengendalian internl adalah suatu pengujian kebenaran yang dilakukan dengan mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas yang berbeda.

Menurut Andi :

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efesiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat duperlukan baik oleh manajer, user sistem akuntansi, perancang sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi.¹

Pengendalian intern adalah suatu sistem yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aset perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran operasi. Pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian intern juga mambantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada dan merupakan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan entitas khusus.Pengendalian intern mempunyai beberapa pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi. Dalam arti luas, dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

Pengendalian Intern yang berlaku dalam entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.Pengendalian intern dalam arti luas meliputi dua hal yaitu pengendalian internal bidang akuntansi dan pengendalian internal bidang administrasi.

1. Pengendalian akuntansi

¹TMBooks, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama: Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hal.36

Pengendalian Akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan atau transaksi keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat sumber data tertentu ditempatkan dalam sistem yang tepat dan benar. Istilah ini dapat merujuk pada prosedur yang memastikan bahwa pengeluaran dan biaya sesuai dengan proyeksi dan rencana. Pengendalian akuntansi yaitu meliputi rencana organisasi, metode dan ukuran, prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang dikoordinasikan terutama untuk menjamin kekayaan organisasi, mengecek ketentuan, keandalan data organisasi dan dirancang untuk menyakinkan:

- a. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan
- b. Transaksi dicatat agar memudahkan penyusunan laporan keuangan dan mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva
- c. Penggunaan atas harta/asset diberikan hanya dengan persetujuan manajemen
- d. Jumlah asset seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan asset yang ada.

Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun.

2. Pengendalian administrasi

Pengendalian administrasi yaitu meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang. Tujuan pengendalian administrasi diutamakan pada pencapaian tujuan operasional seperti hubungan masyarakat, efisiensi operasi atau pabrik, efektivitas operasional dan efektivitas manajemen.

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi pada tingkat organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan kepada hukum dan regulasi.

Mei Hotma Mariati Munte Mengemukakan:

Keandalan sistem pengendalian internal harus dilandasi dengan karakteristik dari sistem tersebut yaitu:

- a. Adanya pendelegasian wewenang kepada petugas tertentu untuk menyetujui transaksi telah disetujui oleh petugas yang berwenang.**
- b. Adanya penyelenggaraan akuntansi sedemikian rupa sehingga mudah dicek.**
- c. Adanya pendelegasian secara fisik yang tepat termasuk penjagaan terhadap aktiva yang dimiliki**
- d. Adanya verifikasi secara periodik terhadap eksistensi aktiva yang dicatat**
- e. Memiliki pegawai yang cakap, mempunyai kemampuan dan pelatihan yang cukup sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing**
- f. Adanya pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi pencatatan dan dari pelaksanaan transaksi yang bersangkutan.²**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu metode yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset tetap, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektifitas operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan adanya

²Mei Hotma Mariati Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal.100

pengendalian intern diharapkan dapat memeriksa kemungkinan terjadinya penyelewengan, penggelapan, atau pemborosan maupun pengeluaran yang tidak mampu dipertanggungjawabkan yang dapat merugikan bahkan menghancurkan perusahaan.

3.Aspek-Aspek Pengendalian intern

Aspek-aspek pengendalian internal yang baik dari aktiva tetap adalah:

1. Persetujuan untuk pengeluaran aktiva tetap biasanya dilakukan oleh berbagai tingkat manajemen, tergantung pada jenis dan harga aktiva tetap yang bersangkutan.

2. Perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan keuangan atau akuntansi secara tertulis mengenai kapitalisasi, untuk membedakan pengeluaran yang merupakan aktiva tetap dan pengeluaran yang bukan aktiva tetap, sehingga dapat mencatat aktiva tetap dengan tepat.

3. Adanya kebijaksanaan dan prosedur mengenai pengadaan aktiva tetap, penjualan, pembesituaan, dan pemindahannya dari bagian ke bagian lain atau antar cabang dan sebagainya.

4. Menyelenggarakan buku-buku tambahan atau kartu-kartu aktiva tetap dan melakukan penghitungan fisik atas aktiva tetap secara periodik atau berkala.

5. Mengasuransikan aktiva tetap untuk jumlah yang cukup dari bencana tertentu, seperti kebakaran atau bencana lainnya, dan kerugian karena kehilangan atau dicuri.

4. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern yang diciptakan dalam rumah sakit harus mempunyai beberapa tujuan agar rumah sakit tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan sistem sehingga tidak terjadi kerugian. Menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada Beragam ketentuan hukum dan peraturan harus diberlakukan oleh setiap perusahaan publik, non publik bahkan organisasi nirlaba. Ketentuan yang berlaku dalam akuntansi tidak langsung yaitu perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak dan akuntansi langsung dalam perusahaan yaitu penghasilan dan kecurangan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:221), pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan – tujuan berikut ini :

1. Keandalan laporan keuangan
2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
4. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan tentunya dengan suatu tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan data yang tepat, dapat dipercaya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset tetap, ketaatan terhadap perundang-undangan, serta dapat melindungi harta perusahaan dari kesalahan dan penyelewengan, penyimpangan dan tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja dan karyawan perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Andi ada 4 tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Operasi

2. Reliabilitas pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
4. Menjaga Keamanan Aset.

Tujuan pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggungjawab hukum maupun profesional untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan.

2. Efektivitas Kegiatan Operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran dan tujuan perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut akurasi informasi keuangan dan non-keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Kepatuhan Terhadap Hukum Dan Peraturan

Perusahaan publik, perusahaan non-publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi:

- a. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan meliputi pencapaian tujuan atas target perusahaan, termasuk juga kinerja tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (aset perusahaan)
- b. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim.
- c. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

4.2.1 Komponen- Komponen pengendalian intern

Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Lingkungan Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan dewan komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha tersebut. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani resiko yang telah diidentifikasi perusahaan.

Menurut COSO “Aktivitas Pengendalian adalah kegiatan-kegiatan pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen, dicapai”. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam beberapa aktivitas diantaranya adalah otorisasi transaksi. Tujuan dari Otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang di proses oleh system informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Setiap transaksi harus diotorisasi dengan semestinya apabila perusahaan menginginkan pengendalian yang memuaskan. Dalam organisasi, otorisasi untuk setiap transaksi hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya

transaksi tersebut. Pemisahan tugas Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar karyawan tidak memiliki peluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan catatan akuntansi, yaitu fungsi penyimpan harta, fungsi pencatat, fungsi otorisasi transaksi bisnis. Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan formulir. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi terlaksananya transaksi di dalam organisasi. Mengamankan harta dan catatan perusahaan Harta perusahaan meliputi kas, persediaan, peralatan dan bahkan data dan informasi perusahaan.

4.2.2 Pengendalian Intern Kredit

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Kasmir (2012:112), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Anwar (2002:14), kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang. Pengendalian intern kredit adalah usaha – usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian intern kredit penting, karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan.

Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan system pengendalian intern kredit yang baik dan benar. Kredit memberikan dampak adanya penangguhan penerimaan uang, baru pada saat jatuh temponya terjadi aliran kas masuk. Penangguhan penerimaan uang tersebut akan memberikan pengaruh yang kurang baik, apabila pemberian kredit yang dilakukan terlalu besar akan terjadi penimbunan modal kerja dalam aktiva lancar kredit yang diberikan. Pengendalian intern kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Maka

diperlukan pengelolaan piutang (kredit) yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pengendalian internal dalam penyaluran kredit sangat penting karena pengendalian ini dapat menjaga kekayaan bank secara lebih baik.

Mulyono (2001:24), berpendapat pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengaman dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

4.2.3 Pemberian Kredit

Menurut Rivai et al (2007:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut Kasmir (2014 : 88) tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
2. Membantu usaha nasabah Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berate adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Menurut Kasmir (2014:89-90) Disamping tujuan di atas fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
 - b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
 - c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

- d. Meningkatkan peredaran barang.
- e. Sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan oleh beberapa cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan oleh beberapa cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPR NBP 1 Siborongborongi Jl. Sisingamangaraja No.250 E Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

3.2 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Danang Sunyoto bahwa: **“Data primer adalah data-data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto, 2006)”**.¹Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai kepada pihak-pihak yang terkait secara lisan mengenai pengendalian intern aset tetap di perusahaan.

Yang termasuk kedalam data primer adalah:

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

Metode Survei (Survey Methods)

- Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

- Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
- Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelesakan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide.
- Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek.
- Teknik yang digunakan adalah (1) wawancara, dan (2) kuesioner.

Wawancara (Interview)

- Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian.
- Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.
- Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden.
- Teknik ini terutama untuk responden yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara atau memerlukan penerjemahan.
- Teknik wawancara dapat dilakukan dengan (1) melalui tatap muka dan (2) melalui telepon.

2. Data Sekunder

Menurut Danang Sunyoto bahwa:

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan

studikepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistika (BPS).²

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengungkapkan:

Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data sekunder dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu.³

Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicat oleh pihak lain).

Menurut Jadongan Sijabat

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi.⁴

3.3 Metode Penelitian Data

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua perlakuan dalam mengumpulkan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

3.3.1 Penelitian kepustakaan

³Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 107

⁴Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.82

Penelitian yang dilakukan hanya dilakukan berdasarkan atas karya tulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan melalui buku-buku teori, artikel dan catatan-catatan kuliah yang releevan. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan.

3.3.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan yang dilakukan langsung kelapangan terhadap objek yang dipilih untuk memperoleh data yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah penelitian.

Juliansyah Noor mengemukakan: **“Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian”**.⁵

Ada dua jenis Teknik penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi mengatakan bahwa :

⁵Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Prenadamedia Group: Jakarta, 2011, hal.138

“Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.⁶

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan pada si peneliti, dan dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab untuk dikesempatan lain.

Menurut Juliansyah Noor:

“Wawancara merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya”.⁷

2. Dokumentasi

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengungkapkan penelitian dokumen sebagai berikut:

Strategi ini berkaitan dengan pengumpulan data dengan menggunakan data dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Metode ini dinamakan juga dengan penelitian biro. Seperti diterangkan diatas, seseorang peneliti ada kalanya tidak harus terjun kelapangan untuk mengumpulkan data tetapi cukup untuk membaca dan mencari data dari pustaka yang ada.⁸

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen

⁶Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, **Metode Penelitian**: Cetakan Ke 15 Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal.83

⁷Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal.138

⁸Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, Op, Cit., hal 110

bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan tulisan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Nanang Martono mengungkapkan metode dokumentasi merupakan **“Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian”**.⁹

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Nanang Martono proses analisis data bertujuan untuk:

1. **Menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian.**
2. **Menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh**
3. **Menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian kita.**
4. **Menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan di lapangan.**
5. **Menjelaskan argumentasi atas hasil temuan di lapangan.**¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu:

1. Metode Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”. Penelitian deskriptif dilakukan

⁹Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi Revisi dua, Cetakan ke empat, Lyon, 2014, hal. 87

¹⁰Ibid., hal. 160

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan penyusunan data berdasarkan landasan teori yang ada agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas tentang pengendalian intern Aset Tetap pada PT. BPR NBP 1 SIBORONGBORONG. Desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini.

2. Metode Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah metode analisis data yang bersumber dari teori atau hal umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan demikian dapat memberi saran yang bersifat membangun kepada PT. BPR NBP 1 Siborongborong untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa yang akan datang.

